

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alasan peneliti memilih judul Pertempuran TNI Bersama Rakyat Melawan Belanda di desa Jatisari Kedungreja Cilacap 13 Maret tahun 1949, yaitu dengan keberadaan tugu pahlawan yang tepat berada di tepi jalan raya di desa Jatisari, Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Setiap peneliti melewati tugu tersebut rasa penasaran dan ingin tahu peristiwa sejarah yang terjadi di balik tulisan yang ada di tugu tersebut semakin kuat. Di tugu tersebut tertulis sebagai berikut:

Tugu Ini Kesaksianku, Kau Pejuang Kau Pahlawan!
Tekadmu Merdeka atau Mati! Pengorbananmu Luhur dan Suci.
Kini Tugas Kami. Mengisi Kemerdekaan Tiada Henti.
Pancasila Jiwaku nan Sakti. Landasan Juang Abadi.
Kami Pewarismu. Pengemban Amanat Suci.
Di daerah ini: Ciklapa pada tanggal 13-3-1949.
Pertempuran TNI bersama rakyat melawan Tentara Belanda.

Diresmikan pada 15 Desember 1976 oleh Bupati
KDH Kabupaten TK II Cilacap Ryk. Mukmin.

Tulisan yang tertera di tugu tersebut membuat peneliti semakin penasaran, untuk segera melakukan penelitian tentang pertempuran TNI melawan Belanda sebagai mana tersebut di atas, maka pada awal bulan Desember 2020 peneliti mulai mengadakan survei atau riset kecil dengan jalan melakukan wawancara dengan beberapa nara-sumber atau informan dan membuat foto dokumentasi. Setelah itu peneliti melakukan konsultasi dengan beberapa teman kuliah yang satu jurusan yang sudah lebih dulu menyelesaikan skripsinya. Alasan yang paling mendasar adalah karena belum pernah ada orang yang melakukan penelitian

terhadap peristiwa bersejarah yang sangat monumental bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II tersebut. Keadaan tugu tersebut kini terbengkalai, rusak, miring, di sekitar tugu tumbuh semak-semak yang lebat, terhalang pohon yang rimbun, juga pembatas jalan sehingga kurang terlihat jelas dari jalan raya. Di samping itu juga, ukuran tugu itu yang relatif kecil. Hal itu karena tidak adanya perhatian masyarakat maupun pemerintah daerah. Sehingga keberadaan tugu serta peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerah tersebut tidak banyak diketahui orang. (Hasil observasi tanggal 7 Desember 2020).

Dengan penelitian ini peneliti berharap hasil penelitian peneliti dapat mengangkat sejarah perjuangan rakyat di Jatisari guna melengkapi dan memperkaya Sejarah Nasional di tingkat lokal. Menambah sumber pembelajaran untuk membangun kesadaran pentingnya memahami sejarah pertempuran itu sendiri. Apa yang sudah dirintis dan diperjuangkan oleh para pejuang bersama rakyat waktu itu menjadi pedoman dan tauladan bagi generasi penerus bangsa dalam turut mengisi kemerdekaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pertempuran TNI bersama rakyat melawan Belanda di desa Jatisari Kedungreja Cilacap tahun 1949?
2. Bagaimana jalannya pertempuran TNI bersama rakyat melawan Belanda di desa Jatisari Kedungreja Cilacap tahun 1949?

3. Apa akibat yang ditimbulkan dari pertempuran TNI bersama rakyat melawan Belanda di desa Jatisari Kedungreja Cilacap tahun 1949?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengungkap masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pertempuran TNI bersama rakyat melawan Belanda di desa Jatisari Kedungreja Cilacap tahun 1949.
2. Untuk membahas jalannya pertempuran TNI bersama rakyat melawan Belanda di desa Jatisari Kedungreja Cilacap tahun 1949.
3. Untuk mengungkap akibat yang ditimbulkan dari pertempuran TNI bersama rakyat melawan Belanda di desa Jatisari Kedungreja Cilacap tahun 1949.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat teoritis**
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengangkat sejarah perjuangan rakyat di Jatisari guna melengkapi dan memperkaya kajian Sejarah Nasional di tingkat lokal.
 - b. Menambah sumber pembelajaran untuk membangun kesadaran tentang pentingnya memahami sejarah pertempuran itu sendiri. Apa yang sudah dirintis dan diperjuangkan oleh para pejuang bersama rakyat waktu itu menjadi pedoman dan tauladan bagi generasi penerus bangsa dalam turut mengisi kemerdekaan.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis untuk menambah wawasan sebagai calon guru pendidikan sejarah. Bagi pendidik atau guru pendidikan sejarah dapat untuk menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran untuk melengkapi sumber, bahan atau materi pelajaran.

E. Kajian Pustaka dan Penelitian Relevan

1. Kajian Pustaka

a. Perang kemerdekaan / Agresi Militer Belanda II

Agresi Militer II adalah operasi Militer Belanda kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Sjahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Sjafrudin Prawiranegara.

1) Latar Belakang Terjadinya Agresi Militer II

Perundingan-perundingan yang dilakukan di bawah pengawasan KTN selalu menemui jalan buntu, sebab Belanda sengaja mengemukakan hal-hal yang tidak mungkin diterima Republik Indonesia. Tawaran rencana KTN yang terkenal dengan “Usul Chritchley-Dobuis” ditolak oleh pihak Belanda karena tidak menguntungkan. Pemerintah Belanda memperhitungkan pula bahwa pertikaian yang terjadi di kalangan Republik Indonesia sebagai akibat dari perjanjian Renville, kegoncangan di kalangan TNI sehubungan dengan adanya rekonstruksi dan rasionalisasi, serta penumpasan pemberontakan PKI Madiun yang menelan

upaya dan kekuatan Republik, memberikan kekuatan kesempatan bagi Belanda untuk lebih menekan Republik Indonesia. Dalam situasi yang gawat ini, pada tanggal 13 Desember 1948 Bung Hatta selaku pimpinan pemerintahan meminta kembali KTN untuk menyelenggarakan perundingan dengan Belanda. Uluran tangan tersebut dijawab oleh Belanda pada tanggal itu juga bahwa perundingan tidak akan diadakan lagi apabila tidak didasarkan pada tuntutan-tuntutan yang diajukan Belanda.

2) Kronologi Terjadinya Agresi Militer II

Pada pukul 21.00 tanggal 18 Desember 1948 pihak Belanda menyampaikan surat kepada Yusuf Ronodipuro, liaison officer delegasi RI di Jakarta. Isinya, terhitung mulai pukul 00.00 tanggal 19 Desember 1948 Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville dan perjanjian gencatan senjata. Berita ini tidak berhasil disampaikan ke pemerintahan RI di Yogyakarta pada malam itu juga karena dihalangi oleh Belanda. Berita pertama tentang Belanda memutuskan serangan pesawat pembom Belanda (Mitchel buatan Amerika) di atas lapangan udara terdekat. (Nasution, A.H.1976), (Poesponegoro, Marwati. 1884), (Rickles, M.C. 2007).

Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yang minim, yaitu beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7. Senjata berat sedang keadaan rusak. Pertahanan pangkalan hanya diperkuat dengan satu kompi TNI bersenjata lengkap. Pukul 06.45, 15 pesawat Dakota, menerjunkan pasukan KST Belanda di atas Maguwo. Pertempuran merebut Maguwo berlangsung sekitar 25 menit. Pukul

7.10 bandara Maguwo telah jatuh ke tangan pasukan Kapten Eekhout. Di pihak Republik tercatat 128 tentara tewas, sedangkan dipihak penyerang, tak satupun jatuh korban. (Nasution, A.H.1976), (Poesponegoro, Marwati. 1884), (Rickles, M.C. 2007).

Sekitar pukul 9.00, seluruh 432 anggota pasukan KST telah mendarat di Maguwo, dan pukul 11.00, seluruh kekuatan Grup Tempur M sebanyak 2.600 orang-termasuk dua batalyon, 1900 orang, dari Brigade T-beserta persenjataan beratnya dibawah pimpinan Kolonel D.R.A. van Langen telah berkumpul di Maguwo dan mulai bergerak ke Yogyakarta. Serangan terhadap kota Yogyakarta juga dimulai dengan pemboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa, antara lain di Jawa Timur dilaporkan bahwa penyerangan, bahkan telah dilakukan tanggal 18 Desember malam hari. Menjelang tengah petang, setelah mengepung kota, Brigadir Marinir Belanda dibantu oleh sejumlah pasukan Ambon dari KNIL berhasil mencapai pusat kota ke istana Presiden. Taktik cepat digunakan Belanda berhasil menangkap Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan anggota kabinet Republik. Sebelum tertangkap, kabinet sempat bersidang. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak akan meninggalkan ibu kota. Hal ini dikarenakan tidak adanya pasukan yang mengawal mereka ke ibukota. Selain itu apabila tetap di dalam kota, hubungan dengan KTN masih dapat dilakukan dan dengan perantaraan KTN, perundingan dengan Belanda dapat dibuka kembali. (Nasution, A.H.1976), (Poesponegoro, Marwati. 1884), (Rickles, M.C. 2007).

Keputusan yang lain dari sidang pada tanggal 19 Desember 1948 adalah memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara

yang ketika itu berada di Bukittinggi untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Mandat juga diberikan kepada dr. Sudarsono, A.A Maramis, dan L.N, Palar untuk membentuk exile goverment di luar negeri bila usaha Sjafruddin Prawiranegara gagal (Nasution, A.H.1976), (Poesponegoro, Marwati. 1884), (Rickles, M.C. 2007).

3) Perang Kemerdekaan Melawan Agresi Militer II

Karena tekanan – tekanan tentara Belanda di daerah Ajibarang semakin dirasakan berat, maka oleh Letnan Sutrisno dan Suroso (Rase), selaku pimpinan pasukan IMAM pada waktu itu diputuskan untuk pindah sementara dari daerah ini dan beroperasi ke selatan. Sasaran operasi menyerang desa Kawunganten yang merupakan ibu kota kecamatan (terletak pada jalan kereta api jalur selatan Kroya-Banjar) Sekitar minggu pertama bulan Maret 1949 suatu pasukan gabungan sebesar \pm 60 orang di bawah pimpinan Letnan Sutrisno dan Suroso berangkat pagi-pagi sekali dari desa Cineang (\pm 10 km barat Ajibarang) menuju ke Selatan, menyeberangi Sungai Tajum, desa Karangkemojing dengan tujuan Kawunganten melalui rute Cidondong-Cidora-Jurangmangu (Sumarmo, 1985: 211).

Di sekitar desa Tegalsari, beberapa kilometer di utara Kawunganten, pasukan memergoki seorang DP (Polisi Belanda) bersenjata lengkap yang ternyata berasal dari asrama (tangsi) Kawunganten. Sewaktu ditangkap ia mengaku sengaja mencari tentara RI karena semua DP dari asrama Kawunganten mau menyerah/melarikan diri. Letnan Sutrisno kemudian melepaskan DP tersebut dengan senjatanya, meskipun Suroso pimpinan IMAM, menyarankan lebih baik menangkap DP tersebut beserta senjatanya. DP tersebut diberitahu bahwa malam

harinya pasukan TNI akan pura – pura menyerang Kawunganten agar dalam kekalutan pertempuran para anggota DP keluar dari asramanya dengan senjatanya dan akan disambut dengan baik-baik. Malam harinya pasukan merayap mendekati asrama DP. Pada jarak 50 meter dari asrama, tiba-tiba pasukan dihujani tembakan genjar sambil para anggota DP tersebut mengejek. Ternyata, alasan akan menyerah kepada TNI hanya tipuan belaka. Ternyata pasukan TNI tidak mengira akan adanya serangan tersebut, maka pasukan kemudian mundur dengan agak kacau, sementara senapan mesin IMAM (KM) yang dipegang oleh Katamsi (Cipto) terus menembak pada jarak \pm 50 meter. Korban di pihak DP tidak diketahui dan pihak pasukan ada seorang prajurit Letnan Sutrisno terkena tembakan pada gagang senapannya sehingga patah dan menyerempet jari tangan serta pipinya.

Pasukan mundur dari Kawunganten melalui rawa-rawa sedalam batas perut dengan terus-menerus dikejar tembakan musuh. Barulah menjelang fajar pasukan lepas dari daerah rawa, tetapi peluru musuh masih terus-menerus mengejar diselingi dengan peluru tracer yang berwarna merah membara berhamburan ke arah pasukan mundur. Kemudian pasukan menuju ke barat melalui bukit gundul, sementara pesawat pengintai (capung) Belanda terus mengikuti gerakan pasukan. Kemudian pasukan membelok ke arah timur masuk hutan jati yang lebat menyusur jalan seperti pada waktu pergi untuk kembali ke arah Ajibarang. (Sumarno, Iwa, 1985: 213 – 214).

b. Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan – badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesyahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada saat – saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, di samping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan – rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui Pepolit, Biro Perjuangan, dan, TNI – masyarakat, sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer, yaitu TNI menghadapi pergolakan senjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di

Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri, yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern.

Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.

Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan. Dan Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950 – 1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang ikut sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum tahun 1955.

Periode yang juga Periode Demokrasi Liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian bekas KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung, pemberontakan Angkatan Perang Ratu

Adil/APRA) di Makasar, pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Sementara itu, DI TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Pada tahun 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia / Perjuangan Rakyat Semesta / PRRI / Permesta melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya.

Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun enam puluhan.

Menyatunya kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu komando, diharapkan dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Namun hal tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bagian dari komunisme internasional yang senantiasa gigih berupaya menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia termasuk ke dalam ABRI melalui penyusupan dan pembinaan khusus, serta memanfaatkan pengaruh / Panglima Tertinggi ABRI untuk kepentingan politiknya.

Upaya PKI makin gencar dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang G30S/PKI, mengakibatkan bangsa Indonesia saat dalam situasi yang sangat kritis. Dalam kondisi tersebut TNI berhasil mengatasi situasi kritis

menggagalkan kudeta serta menumpas kekuatan pendukungnya bersama – sama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam situasi yang serba chaos itu, ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan hankam dan sebagai kekuatan sospol. Sebagai alat kekuatan hankam, ABRI menumpas pemberontak PKI dan sisa-sisanya. Sebagai kekuatan sospol ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen.

Sementara itu ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara memantapkan integrasi internal. Langkah pertama adalah mengintegrasikan doktrin yang akhirnya melahirkan doktrin ABRI Catur Dharma Eka Karma (Cadek). Doktrin ini berimplikasi kepada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan latihan gabungan antara Angkatan dan Polri. Disisi lain, ABRI juga melakukan integrasi eksternal dalam bentuk kemandunggalan ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa (AMD).

Peran, Fungsi dan Tugas TNI (dulu ABRI) juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok itu dibagi 2 (dua) yaitu: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang – undang, membantu tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Sebagai alat pertahanan negara, TNI berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi internal TNI seiring dengan tuntutan reformasi dan keputusan politik negara. (Kepala Pusat Sejarah ABRI Ikhtisar Sejarah RI).

2. Penelitian Relevan

Penelitian ini merujuk pada beberapa kajian pustaka yang peneliti gunakan, kajian pustaka tersebut terdiri dari penelitian sejenis yang sudah ada diantaranya:

a. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Hidayat (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Pertempuran Rakyat di desa Sidobunder Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen pada tahun 1946-1947”.

Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Hidayat (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Pertempuran Rakyat di desa Sidobunder Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen pada tahun 1946-1947”. Persamaannya merupakan sejarah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan kolonialisme Belanda (NICA) yang bermaksud kembali menjajah Bangsa Indonesia dengan cara membonceng tentara Inggris yang oleh sekutu (sebagai pemenang PD II) di beri kuasa dan mengurus tentara Kerajaan Jepang yang kalah perang dengan sekutu dalam Perang Dunia II, dengan melancarkan Agresi Militer I dan II.

Perbedaannya dalam penelitian ini pertempuran dilakukan oleh TNI, rakyat, dan Tentara Pelajar. Sedangkan pertempuran yang terjadi di desa Jatisari Kecamatan Kedungreja hanya dilakukan oleh TNI bersama rakyat dan para pejuang. Dalam pertempuran tersebut jatuh korban salah satu anggota Tentara Pelajar. Demikian pula pertempuran di desa Jatisari gugur salah satu anggota TNI, yaitu sebagai kepala pasukan. Mereka ikut memanggul senjata dan berperan aktif dalam berbagai medan pertempuran, bahu-membahu dengan pasukan TNI dengan laskar-laskar pejuang lainnya. Pertempuran ini berakhir setelah berlangsung

selama 3 hari, sedangkan pertempuran TNI bersama rakyat di desa Jatisari Kecamatan Kedungreja hanya berlangsung selama satu hari.

Mereka disebut dengan Pelajar Pejuang. Padahal, pada masa Perang Kemerdekaan, nama yang melekat pada kelompok pelajar ini adalah TP (Tentara Pelajar) atau TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar). Justru nama TP atau TRIP itulah yang menjadi trade mark suatu kelompok remaja bersenjata dengan pakaian seadanya tetapi cukup disegani oleh lawan maupun kawan, karena di berbagai medan pertempuran dikenal sebagai kelompok yang berani. Bahkan kadang – kadang bertindak diluar batas perhitungan strategi militer. (Kepala Pusat Sejarah ABRI, dalam buku Ichthisar Sejarah RI halaman : 28).

Perbedaan yang lain, yaitu pada tempat dan waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Hidayat yaitu mengenai pertempuran yang terjadi di desa Sidobunder, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen pada tahun 1946 – 1947.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Candra Bahara (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan di Kabupaten Banjarnegara (1945 – 1949)”.

Penelitian lain yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Candra Bahara (2014) dalam skripsinya yang berjudul Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan di Kabupaten Banjarnegara (1945 – 1949).

Persamaannya merupakan Perang Kemerdekaan melawan penjajah Belanda dalam Agresi Militer Belanda II di daerah. Kabupaten Banjarnegara merupakan jalur perhubungan antar daerah yaitu Purwokerto, Wonosobo, Kedu, Banyumas dan Pekalongan. Hal inilah yang sangat memungkinkan apabila tentara Belanda menggunakan Kabupaten Banjarnegara sebagai jalur untuk

kepentingan Belanda. Kabupaten Banjarnegara adalah kota kecil yang berada di Provinsi Jawa Tengah, tetapi dalam perang kemerdekaan melawan penjajah Belanda memiliki peran yang cukup besar khususnya di wilayah Karesidenan Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Posisi geografis serta keadaan alam yang seperti ini menjadikan Kabupaten Banjarnegara menjadi wilayah yang strategis dan penting sebagai garis pertahanan untuk wilayah Jawa Tengah bagian barat. Demikian pula, dengan Kabupaten Cilacap khususnya, bagian barat. Persamaan yang lain adalah merupakan pertempuran yang dilakukan oleh TNI bersama rakyat, serta adanya peninggalan sejarah yang masih ada.

Perbedaannya pada tempat dan waktu. Pertempuran-pertempuran ini terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara, sedangkan pertempuran yang penulis teliti hanya pertempuran yang terjadi di desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

Perbedaan waktunya yaitu pertempuran-pertempuran yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara berlangsung dari tahun 1945 sampai tahun 1949 yaitu pada Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II. Sedangkan yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap hanya terjadi selama satu hari yaitu pada tanggal 13 Maret 1949.

Catatan sejarah yang sejenis yaitu buku Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 Agresi Militer Belanda I yang ditulis oleh Nasution. Dengan dipelopori oleh batalyon cadangan kita, rakyat beramai-ramai membuat rintangan dan merusak jalan-jalan di pedalaman itu dengan merubuhkan pohon dan merusak jembatan sehingga musuh harus berpatroli dengan berjalan kaki. Kota yang sudah

kita tinggalkan banyak yang terus kita ganggu dari luar. Asisten Wedana Lebak Asin (antara Slawi –Balapulang) dengan kepala kampung sebagai “pemimpin garong” banyak berjasa mengacaukan musuh malam hari, sedangkan siang hari mereka bertugas seperti biasa seolah tiada apa-apa.

Rupanya banyak anasir dari kalangan Cina yang mempergunakan kesempatan ini untuk balas dendam. Mereka segera membentuk komite Po An Tui di Tegal dan Slawi. Ketika tentara Belanda datang, mereka menyambut dengan gembira. Mereka selanjutnya membentuk beberapa pasukan Po An Tui untuk membantu tentara pendudukan mematahkan perlawanan rakyat Indonesia. Hal ini menambah tegangnya suasana antara kedua golongan masyarakat.(Nasution, A. H, 5, 1978 : 216).

Berdasarkan beberapa judul penelitian di atas memberikan gambaran bahwa perjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal kemerdekaan Republik Indonesia terjadi pada tahun 1945-1949. Perjuangan tersebut untuk menghadapi Agresi Militer Belanda I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II pada tahun 1948. Selain itu juga masih banyak peristiwa heroik yang terjadi selama masa perang kemerdekaan tahun 1945 – 1949 di berbagai daerah di Jawa Tengah yang belum teridentifikasi atau belum tercatat termasuk di daerah Cilacap khususnya, Cilacap Barat tempat penelitian ini diadakan. Hal ini dikhawatirkan jika tidak segera diangkat atau didokumentasikan lambat laun berbagai peristiwa patriotik dan heroik itu satu – demi satu akan hilang dari ingatan Bangsa Indonesia khususnya generasi muda, seiring dengan semakin habisnya para pelaku sejarah atau saksi sejarah dan peninggalan atau bangunan bersejarah dari peristiwa masa lampau itu akibat

faktor usia atau meninggal dunia serta akibat tergerus oleh perputaran waktu dan perubahan zaman.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian sejarah dengan judul *Pertempuran TNI Bersama Rakyat Melawan Belanda di Desa Jatisari Kedungreja Cilacap Tahun 1949*.

F. Landasan Teori dan Pendekatan

1. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik, perang dan diplomasi. Konflik merupakan suatu bentuk permusuhan, perselisihan, persengketaan, atau protes sosial yakni tempat orang secara perseorangan atau kelompok masuk berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menyakiti pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan (Subiyanto, 1980: 80).

Timbulnya konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda karena Belanda melanggar perjanjian, tidak mau mengakui kedaulatan bangsa Indonesia dan menyampaikan tuntutan agar diadakan *gendarmarie* bersama, juga usul pembubaran TNI dan menghidupkan kembali KNIL (Bulkin, 1991: 64). Puncak dari konflik tersebut adalah Agresi Militer I Belanda pada tahun 1947 dan agresi Militer II Belanda 1948.

Konflik yang terjadi antara kedua negara yang tidak dapat ditemukan solusinya akan berkembang menjadi sebuah peperangan. Perang secara umum merupakan kenyataan yang keras, dapat diartikan sebagai kompetisi antarbangsa (Rais, 1989: 21). Namun kompetensi dapat juga diartikan sebagai tempat orang perorangan berusaha mencapai tujuan dengan cara damai (Subiyanto, 1980: 80).

Menurut Hobbes, perang merupakan kegagalan seluruh tradisi baik dalam pencariannya pada kebenaran maupun ketidakmampuannya dalam membimbing manusia ke arah perdamaian (Rais, 1989: 23).

Carl von Clausewitz mengatakan bahwa perang adalah lanjutan dari politik dengan menggunakan cara-cara lain. Perang dihubungkan dengan pembunuhan, pembakaran, perampokan, pemerkosaan dan perbuatan kekerasan lainnya. Pokoknya perang berarti penderitaan dan penyebab langsungnya adalah kaum militer (Soebijono, 1997: 102).

Gloffeiy Gorres berpendapat bahwa perang merupakan pertikaian antara satu kelompok yang terorganisir melawan kelompok lain agar dapat melukai dan membunuh lawan (Rais, 1989: 49). Salah satu jenis perang adalah perang gerilya. Perang gerilya adalah perang secara bersembunyi yang dilakukan pada waktu malam hari (Chaniago, 1994: 49). Untuk menunjukkan eksistensi RI, selama Agresi Militer Belanda terjadi perang gerilya di Kebumen yang dilakukan oleh TNI, pejuang, serta rakyat (Sumarmo, 1985: 139).

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945 ditempuh dengan dua cara, melalui perjuangan diplomasi dan melalui perjuangan fisik. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan melalui berbagai perundingan diantaranya Linggarjati, Renville, Roem – Royen, dan KMB (Notosusanto, 1992: 123).

Sedangkan perjuangan fisik adalah perjuangan melalui kekuatan senjata. Strategi serangan dilakukan dengan cara menyusun kekuatan untuk mengadakan serangan, misal tampak pada Serangan, misal tampak pada Serangan Umum 1 Maret 1949 (Bulkin, 1991: 65).

2. Pendekatan

Pendekatan merupakan sebuah cara untuk mendekati, sehingga objek dapat diungkapkan se jelas mungkin. Pengertian yang lain dari pendekatan adalah sebagai sifat suatu ilmu pengetahuan, melaluinya objek diungkapkan secara lebih objektif. Jadi pendekatan adalah suatu cara atau suatu landasan untuk mendekati objek penelitian dengan sebagai sifat suatu ilmu pengetahuan yang mana objek dapat diungkapkan secara lebih objektif.

Pendekatan yang akan peneliti gunakan untuk mengungkap pertempuran TNI bersama rakyat melawan Belanda di desa Jatisari Kedungreja Cilacap tahun 1949 yaitu pendekatan sejarah politik. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelusuri Pendudukan Belanda di Cilacap, terutama pertempuran TNI bersama rakyat melawan Belanda di Desa Jatisari Kedungreja Cilacap tahun 1949.

Ada pernyataan yang berbunyi: “Politik adalah sejarah masa kini dan sejarah adalah politik masa lampau.”. di sini ditegaskan bahwa sejarah adalah identik dengan politik, sejauh keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para aktor dalam interaksinya serta peranannya dalam usahanya memperoleh “apa, kapan, dan bagaimana”.

Untuk memahami pernyataan itu sudah barang tentu kita beranggapan bahwa sejarah di sini terutama menyoroti dimensi politik seperti yang lazim kita hadapi di masa lalu sewaktu sejarah politik masih dominan dalam penulisan sejarah.

Dalam keadaan sekarang sebenarnya sejarah politik masih cukup menonjol, namun tidak terlalu dominan seperti dimasa lampau, lagi pula, telah mengalami perubahan. Sangatlah menarik bahwa pengaruh ilmu politik dan ilmu

– ilmu sosial sungguh besar dalam penulisan sejarah politik dalam penulisan sejarah politik yang lebih tepat disebut sejarah politik gaya baru.

Apabila polity didefinisikan sebagai pola distribusi kekuasaan, maka jelaslah bahwa pola distribusi itu dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan kultural. Barangsiapa menduduki posisi sosial tinggi, memiliki status tinggi, maka bagi dia ada kesempatan dan keleluasaan memperoleh bagian dari kekuasaan. Dia lebih mudah mengambil peranan sebagai pemimpin. Berdasarkan relasinya, ada sumber daya sosial-budaya untuk melakukan peranan politiknya, artinya menyebarkan pengaruhnya. Padanya ada pula otoritas sebagai alat utama untuk berperan politik.

Kecuali status, sumber daya ekonomis pun dapat mendukung faktor politik. Sehubungan dengan hal ini cukuplah ditunjukkan contoh dari pemilihan calon presiden AS, suatu proses politik yang menelan banyak biaya dan sumber daya lain-lain.

Kalau dapat dibenarkan status sering membawa kekayaan, namun sebaliknya tidak selalu benar kekayaan selalu membawa status dan kekuasaan.

Berbicara tentang pola distribusi kekuasaan kita tidak dapat melupakan faktor kultural sebagai faktor penentu. Jenis otoritas dan struktur kekuasaan sangat dipengaruhi oleh orientasi nilai dan pandangan hidup para pelaku. Kerangka konseptual ilmu politik menyediakan banyak alat analitis untuk menguraikan pelbagai unsur politik aspek politik, kelakuan aktor, nilai – nilai yang melembaga sebagai sistem politik dan lain sebagainya.

Beberapa unsur yang senantiasa dijumpai dalam proses atau gejala politik ialah kepemimpinan, otoritas, ideologi, organisasi dan lain sebagainya. masalah

kepemimpinan senantiasa menjadi faktor kunci dalam proses politik. Berdasarkan teori Max Weber dapat dibedakan tiga jenis kepemimpinan menurut jenis otoritas yang disandangnya. Tiga jenis otoritas itu ialah: (1) otoritas karismatis, yaitu berdasarkan pengaruh dan dan kewibawaan pribadi; (2) otoritas tradisioanal, yaitu yang dimiliki berdasarkan pewarisan atau turun – temurun; (3) otoritas legal, rasional, yaitu yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya.(Kartodirdjo.S, 1993: 148-152)

Pemimpin tipe 2 memperoleh kekuasaan dari jabatan atau pemimpin formal, sedang tipe 3 adalah pemimpin informal. Pada dia ada kekuasaan karismatis. Dalam konteks Indonesia tipe 2 pada umumnya juga memiliki otoritas tradisional, ialah golongan aristokrasi yang masih masih mempunyai hak mewariskan jabatan, terutama yang memangku jabatan pamong praja (BB). Pelbagai tipe kepemimpinan menduduki lokasi sosial-historis dengan orientasi berbeda-beda sehingga berbeda pula reaksinya terhadap inovasi, yaitu penolakan, adaptasi, dan asimilasi. Konflik politik dapat dikembalikan kepada faktor sosiokultural dengan kepentingan ideologi atau nilai tertentu.

Keuntungan (*interest*) bertalian erat dengan posisi ekonomis, kelas sosial, atau pada umumnya peranan seseorang dalam sistem ekonomis, sosial dan politik. Jelaslah disini bahwa *interest* semata-mata adalah fungsi ekonomis atau fungsi dalam sistem produksi.

Ada jalinan kompleks antara kelas, status, dan kekuasaan di satu pihak, sedangkan pihak lain status dan kekuasaan tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan ekonomi. Pelbagai kepentingan diekspresikan dalam bentuk simbol sebagai kristalisasi identitas individu atau kelompok. Tambahan pula ideologi

berfungsi sebagai perumusan legitimasi posisi atau kepentingan individu atau golongan. Sudah barang tentu kepentingan itu tidak perlu langsung berkaitan dengan kebutuhan ekonominya. Yang jelas ialah bahwa analisis atas golongan sosial berdasarkan stratifikasi sosial sangatlah relevan untuk menjelaskan konflik dan perjuangan politik dalam masyarakat bersangkutan. Dengan demikian, dapat diidentifikasi pula hubungan antara ekonomi, *society*, *polity*, dan kultur sebagai unsur-unsur dari suatu sistem. Dimensi sosial dari proses politik mencakup status dan peranan elite politik: bangsawan, aristokrasi, birokrat, kaum intelektual, elite religius, merikokrasi, elite desa, dan lain sebagainya. Otoritas yang mereka miliki antara otoritas karismatis, termasuk yang sudah mengalami rutinisasi, tradisional, otoritas legal dan rasional.

Bagaimana interaksi dalam proses perjuangan kekuasaan, terutama dalam periode transisi (abad ke-19 dan ke-20) sewaktu orientasi nilai – nilai bergeser sebagai dampak proses-penetrasi pengaruh Barat dan modernisasi? Posisi sosial-kultural elite masing-masing menimbulkan konflik.

Dalam hubungan ini skenario politik baik di tingkat *mezzo* (menengah) mikro (rendah) dapat digambarkan secara rinci berdasarkan analisis ilmu sosial sedemikian rupa, sehingga dapat diekstrapolasikan, antara lain, (1) gejala atau pola umum perjuangan politik; (2) kecenderungan dalam proses politik yang menunjukkan keteraturan (*regularities*). Kedua gejala ini akan menambah makna kejadian-kejadian serta memberi kemungkinan untuk membuat perbandingan serta generalisasi. (Kartodirdjo, S. 1993 : 148 -152)

G. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah yaitu dengan cara menggabungkan metode penelusuran historis dokumenter dan metode penyelidikan dengan teknik observasi. Observasi dilakukan dalam dua jenis, yaitu survei kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari semua pustaka yang memuat perihal yang berkaitan dengan judul atau rumusan masalah serta observasi lapangannya itu mengadakan penelitian dan pengamatan langsung ke obyek serta mendokumentasikan.

Metode penelitian yang disusun berdasarkan metode sejarah, sesuai dengan langkah-langkah yang dibagi atas empat kelompok, yaitu:

1. Heuristik

Merupakan kegiatan awal menghimpun jejak-jejak masa lampau. Perincian sumber-sumber yang dibutuhkan dalam sejarah tertulis berupa manuskrip-manuskrip. Heuristik merupakan sebuah tahapan atau kegiatan untuk mencari maupun menemukan sumber, data dan informasi mengenai masalah yang diangkat, baik tertulis maupun tidak tertulis (dokumen dan artifak), yang disesuaikan dengan jenis sejarah yang akan ditulis (Kuntowijoyo, 1995: 94). Secara sederhana, heuristik merupakan mencari jejak-jejak yang ditinggalkan karena setiap aktifitas pastilah meninggalkan bukti-bukti bahwa pernah ada suatu aktivitas. Sumber-sumber ini berupa:

a. Sumber Lisan

Sumber sejarah lisan merupakan keterangan langsung dari para saksi sejarah. Biasanya disebarkan dari mulut ke mulut. Sumber lisan yang penulis kumpulkan antara lain menggunakan metode sejarah lisan kepada sejarah

informan yang dijadikan narasumber untuk melengkapi hal-hal yang tidak termuat dalam dokumen, adapun informan yang penulis jadikan narasumber adalah wawancara langsung dengan bapak Sudari, bapak San Sutardji, bapak Dulah Kasan, bapak Tohidin, bapak Muhrodi (Deman), bapak Sodikin, dan bapak Kosim Siman,.

b. Sumber Tulisan

Sumber tertulis yang penulis kumpulkan berupa buku-buku sejarah perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda.

c. Sumber Artifak

Artifak meliputi benda-benda peninggalan, dapat berupa monument, serta barang peninggalan lainnya, atau alat-alat prasejarah. Sumber artifak yang penulis kumpulkan antara lain foto atau gambar mengenai pertempuran.

2. Kritik

Kritik merupakan sebuah proses pengujian yang mempertimbangkan faktor historis dari suatu teks untuk dapat menggali maknanya secara lebih mendalam. Kritik juga merupakan langkah pengujian terhadap bahan-bahan sumber sejarah yang akan digunakan dalam penulisan sejarah. Verifikasi dilakukan untuk menilai apakah data itu asli dan bisa dipercaya (Priyadi, 2013: 118). Setelah mengumpulkan data, kemudian data perlu diuji untuk diperoleh fakta-fakta yang bersifat objektif.

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern dilakukan untuk mencari keotentikan atau keaslian sumber. Kritik ekstern melihat data dari sisi luar sejarah yang dilakukan dengan mencari

kebenaran sumber sejarah melalui sejumlah pengujian terhadap berbagai aspek di luar sumber sejarah. Kritik ekstern pada sumber tertulis menyangkut pada bagaimana kondisi fisik dari dokumen maupun catatan yang ditemukan. Apakah dibuat pada zamannya atau dibuat pada masa kini. Hal itu berlaku juga pada *artifact* atau sumber bangunan. (Priyadi, 2011: 75).

Kritik dilakukan terhadap sumber yang didapat oleh peneliti. Sumber yang didapat adalah sumber dokumen buku. Sumber dokumen buku yang peneliti dapat dikritik dengan cara melihat cover buku atau sampul depan buku sudah sesuai, tahun terbit buku sudah sesuai, kertas buku masih ada yang menggunakan kertas buram, penulisan atau penggunaan EYD masih banyak yang belum sesuai dengan EYD.

b. Kritik Intern

Kritik intern merupakan kritik yang menilai apakah sumber itu memiliki kredibilitas atau kebiasaan untuk dipercaya atau tidak. Kritik intern dilakukan dengan memperhatikan dua hal yaitu interistik terhadap sumber-sumber dan membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber sumber agar sumber dapat dipercaya (diterima kredibilitasnya) (Priyadi, 2011: 81)

Kritik dilakukan terhadap dokumen sumber sejarah, apakah benar kejadian tersebut atau hanya sebuah rekayasa. Peneliti harus memeriksa sumber tersebut, apakah sumber-sumber tersebut saling mengisi atau tidak. Sumber-sumber yang berupa buku saling mengisi dan saling mendukung.

3. Interpretasi

Tahap selanjutnya melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap data tersebut. Tahap ini sering disebut sumber subyektifitas, karena menurut Kuntowijoyo (1995: 100) pendapat tersebut sebagian benar dan sebagian lagi salah. Interpretasi sebagai sumber subyektifitas dikatakan benar karena tanpa penafsiran sejarawan, data data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur, akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Interpretasi mengandung maksud sebagai penafsiran terhadap data yang terkumpul setelah melakukan penyeleksian atau penyajian sumber (kritik sumber). Dengan kata lain dalam langkah ini peneliti menggabungkan semua fakta-fakta yang telah didapat dari para informan menjadi satu kesatuan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penafsiran oleh penulis. (Kuntowijoyo, 1995: 100). Penerapannya di dalam penelitian ini.

4. Historiografi

Historiografi merupakan untuk merekonstruksi masa lampau untuk menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan. Agar hasil dari peneltian ini agar diketahui masyarakat, maka hasil interpretasi dalam bentuk penulisan sejarah dengan menggunakan prinsip historiografi harus dipublikasikan (Kuntowijoyo,1995). Penerapannya di dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam memahami isi skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penyajian penelitian ke dalam lima bab:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan penelitian, landasan teori dan pendekatan, metode penelitian dan sistematika penyajian.

Bab dua, berisi tentang latar belakang pertempuran TNI bersama rakyat melawan Belanda di Desa Jatisari Kedungreja Cilacap tahun 1949.

Bab tiga, jalannya pertempuran TNI bersama rakyat melawan Belanda di Desa Jatisari Kedungreja Cilacap tahun 1949.

Bab empat, akibat yang ditimbulkan pertempuran TNI bersama rakyat melawan Belanda di Desa Kedungreja Cilacap tahun 1949.

Bab lima, berisi tentang simpulan dan saran.

